



# TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

JANUARI 2021

# 2021

## HAPPY NEW YEAR CATATAN BERANDA

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Tahun 2020 telah kita lewati dengan banyak keprihatinan menghadapi ujian berat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat bagi Bangsa Indonesia, dengan hadirnya banyak cobaan yang tidak mudah sekaligus menjadi ujian yang amat berat. Namun sebagai makhluk Tuhan yang pandai bersyukur. Ucapan Alhamdulillah tetap senantiasa kita panjatkan ke Allah swt atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita mampu menghadapinya dengan ketegaran dengan keyakinan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kita yakinkan lagi pada diri kita, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Kita mengawali 2021, dengan melanjutkan ujian berat sejak 2020, yakni belum redanya pandemi COVID. Lonjakan kasus COVID sebagai akibat libur panjang akhir tahun, menjadikan kita untuk selalu waspada. Terlebih pada awal tahun ini, negeri kita tercinta didera bencana: gempa bumi, jatuhnya pesawat Sriwijaya, tanah longsor, banjir dan lain-lain. Gambar dibawah ini, menggambarkan banyaknya Bencana Alam di awal tahun 2021. Namun demikian kita mesti tetap Positive Thinking bahwa Tuhan Tidak Akan Menguji Hamba-Nya di Luar Batas Kemampuannya. Oleh karena itu, kita patut berusaha maksimal untuk keluar dari ujian ini.



Dengan semangat bahwa kita pasti "BISA", maka Pusat PTRa telah melaksanakan persiapan-persiapan untuk mengisi tahun 2021 dengan berbagai macam kegiatan, antara lain:

1. Memberikan bantuan teknis kepada kota/kabupaten untuk menyusun 100 RDTR;
2. Memberikan layanan Asistensi, Konsultasi dan Supervisi untuk penyusunan RTRW dan RDTR;
3. Mendukung target penyelesaian 75 RDTR OSS untuk meningkatkan investasi di Daerah;
4. Melaksanakan Pemetaan Atlas dengan berbagai tema antara lain: Atlas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Atlas SDGs, Atlas bentang lahan Gunung Api, Atlas Geospasial Indonesia dan Atlas Taktual untuk Provinsi Jawa Barat;
5. Mengembangkan *E-Atlas* agar pengguna bisa memperoleh informasi dan memanfaatkan Atlas secara maksimal;
6. Mengembangkan *Prototype* sistem Informasi Geospasial Tujuan Pembangunan berkelanjutan di level Desa/Kelurahan;
7. Menyusun Neraca Sumberdaya Alam.

Dan juga tugas tambahan untuk mendukung pembangunan Dashboard Informasi Geospasial Tematik sebagai *Tools* dalam Pembinaan Data dan Informasi Geospasial di Indonesia. Selanjutnya pusat PTRa juga melakukan dukungan terhadap program Pemerintah "**Bangga Berwisata di Indonesia**" untuk menghidupkan gairah Industri Wisata di masa Pandemi COVID.

Tahun 2021 ini juga merupakan tantangan untuk Pusat PTRa dalam mengimplementasikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni

1. Memastikan bahwasannya dengan UUCK pelaksanaan penyusunan Peta Rencana Tata Ruang dapat berjalan lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga;
2. Melaksanakan amanah Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sedemikian rupa sehingga tidak ada tumpang tindih;
3. Menguatkan peran Badan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan Pemetaan Tata Ruang.

Integrasi tata ruang darat dan laut serta udara dalam UU Cipta Kerja mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana zonasi agar pengelolaan darat dan laut terpadu dan terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pemisah antara RTRW dengan RZWP3K. Ketentuan dalam pasal 17 UU CK, juga diharapkan dapat menyelesaikan atau menghindari tumpang tindih penataan ruang di darat dan laut baik struktur maupun pola ruangnya. Selanjutnya, muatan RTR yang mencakup ruang laut, akan disusun secara sinergis dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, sedangkan muatan RTR yang mencakup ruang udara disusun secara sinergis dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan ruang udara.

Akhirnya, beranda ini kita tutup dengan semangat bahwa "Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita." Mari kita bersama, memaksimalkan iktihart kita, menyertakan doa kita untuk menghadapi ujian berat yang dihadapi bangsa kita. Semoga pandemi Covid-19 segera berlalu. Aamiin. [Dr.-Ing.Khafid, 2021]

## Pokja Pembinaan Pemetaan Tata Ruang

Koordinator Pokja: Ryan Pribadi

### "Menata Ruang Melalui Pembinaan Pemetaan Tata Ruang"

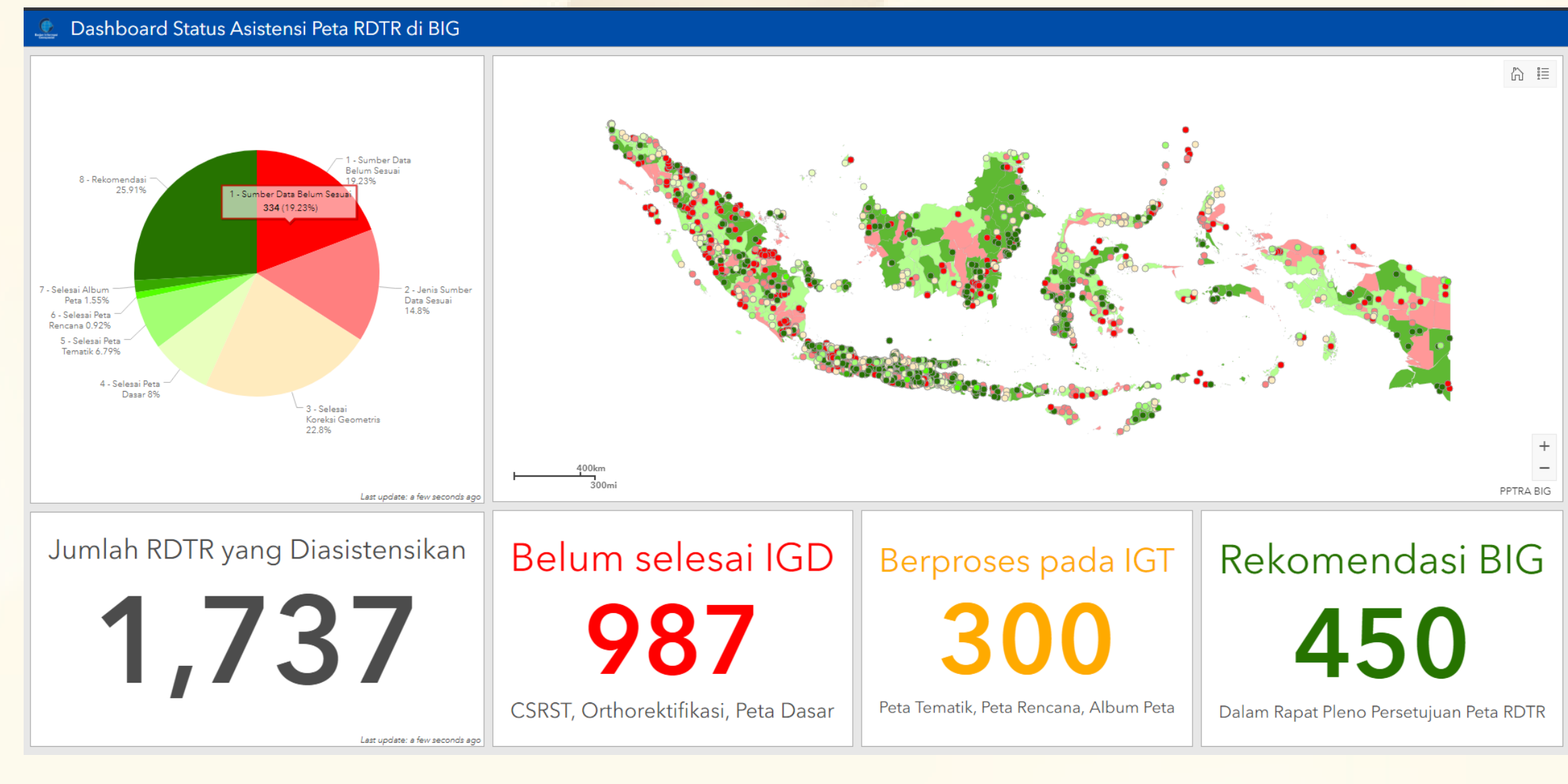
akan diteruskan di tahun 2021 dengan beberapa FGD untuk menyempurnakan hasil kajiannya.

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup sibuk bagi Bidang Pemetaan Tata Ruang BIG, karena selain kegiatan internal juga terdapat beberapa kegiatan percepatan penyelesaian rencana tata ruang yang mengharuskan BIG terlibat di dalamnya. Dimulai dengan adanya arahan pimpinan BIG agar seluruh penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang disusun oleh pusat menggunakan peta dasar yang dibuat oleh BIG. Pada tahun 2020 ada 26 RDTR yang disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang merupakan rencana baru sehingga dapat dipastikan belum tersedia peta dasar skala 1:50000 nya. Untuk itulah maka Bidang Pemetaan Tata Ruang harus aktif melakukan koordinasi pembuatan peta dasar untuk wilayah yang direncanakan. Pembuatan peta dasar ini melibatkan personel dari dua pusat yaitu Pemetaan Rupabumi dan Toponim, serta Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Kegiatan ini selesai pada Bulan Desember 2020 dan peta dasar telah diserahkan kepada Kementerian ATR.

Kemudian di penghujung tahun 2020, kembali BIG terlibat dalam pembuatan Peta RDTR *Online Single Submission* (OSS), yang rencananya akan disusun tahun 2021. Terdapat 75 RDTR OSS di seluruh Indonesia yang akan disusun. Koordinasi intensif untuk rencana pemetaan 1:50000 sudah dimulai sejak akhir tahun 2020 agar pada tahun 2021 bisa langsung dimulai dan dapat selesai tepat waktu. Seluruh RDTR OSS dijadwalkan harus selesai pada Bulan Juni 2021 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itulah seluruh kegiatan pemetaan harus direncanakan dengan matang. Koordinasi ini melibatkan BIG, LAPAN dan Kementerian ATR. Saat ini kegiatan tersebut sudah dimulai dan diharapkan selesai di Bulan Juni 2021.

Kegiatan internal BIG pada tahun 2020 adalah Kegiatan Bantuan Teknis Percepatan Penyelesaian Peta RTRW dan RDTR. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Bidang Pemetaan Tata Ruang yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara kontraktual melalui pihak ketiga. Untuk tahun 2020 terdapat 30 daerah yang dibantu penyusunan peta RTRW nya, dan 80 daerah yang dibantu peta RDTR nya. Seluruh peta RTRW dan RDTR yang mendapatkan bantuan ini juga diakhiri dengan penyerahan surat rekomendasi akhir perpetaan dari BIG yang merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk pengesahan peraturan daerahnya. Bantuan Teknis untuk tahun 2020 ini selesai pada Bulan Desember 2020.

Pada Bidang Pemetaan Tata Ruang juga terdapat dua kegiatan kajian, yaitu Kajian Analisis Spasial untuk Aspek Fisik dan Lingkungan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, serta Kajian Pemanfaatan Drone untuk Evaluasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk RDTR. Kedua kegiatan ini sudah melalui serangkaian FGD dan diskusi dengan para pakar baik di internal BIG maupun akademisi. Kajian ini diharapkan menghasilkan *output* berupa dokumen atau naskah akademis yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan NSPK dan aturan teknis terkait. Namun karena keterbatasan waktu maka kedua kajian ini belum final, masih



Selain itu juga di Bidang Pemetaan Tata Ruang terdapat kegiatan revisi Lampiran Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2013 tentang Ketentuan Peta Rencana Tata Ruang. Substansi yang mengalami perubahan adalah klasifikasi unsur rencana yang berubah mengikuti Permen ATR tentang Basis Data Rencana Tata Ruang, sehingga mengakibatkan simbolisasi unsur dan warnanya mengalami perubahan karena perbedaan nomenklatur klasifikasi tersebut. Saat ini substansi perubahan sudah selesai dan sudah masuk ke Bagian Hukum BIG untuk dibuatkan *legal draftingnya*. Demikian sekilas gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan di Bidang Pemetaan Tata Ruang sepanjang tahun 2020.

## Pokja Atlas

Koordinator Pokja Atlas: Niendyawati

### "Geoliterasi Untuk Negeri Melalui Atlas"

Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial (APS) sesuai Perka BIG Nomor 3 tahun 2012 dan setelah mengalami perubahan struktur organisasi menjadi Kelompok Kerja Atlas berbasis Peraturan BIG No. 8 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020, salah satu tugasnya masih terkait penyelenggaraan atlas untuk mendukung proses pembangunan strategis. Untuk tahun 2020 Kelompok Kerja Atlas mendapat amanah menyelenggarakan empat atlas yaitu Atlas Kewilayahan berupa Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Jawa bagian Barat, Atlas Geospasial Indonesia, Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Atlas Taktual.

Atlas Kewilayahan dengan tema Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Jawa bagian Barat, menyajikan informasi geospasial berupa pemanfaatan sumberdaya lahan gunungapi khususnya tipe A di wilayah Jawa bagian barat, melanjutkan wilayah Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Mengingat Indonesia mempunyai 127 gunungapi aktif yang terdapat 77 gunungapi tipe A, 29 gunungapi tipe B dan 21 gunungapi tipe C. Gunungapi tipe A merupakan gunungapi yang tercatat pernah erupsi magmatik sekurang-kurangnya sekali setelah tahun 1600 Masehi, oleh karena itu tipe ini dianggap masih mempunyai pengaruh terhadap kehidupan kita saat ini. Atlas ini tidak menonjolkan aktifitas kegugunganannya, namun lebih mengulas aspek pemanfaatan lahan oleh masyarakat disekitar gunungapi. Pembaca diajak menggeser cara pandang tentang erupsi gunungapi dari sebuah sumber bahaya menjadi sebuah anugerah dimana setelah terjadi letusan gunungapi, membawa pembaharuan terhadap tatanan sumberdaya lahan disekitarnya. Gunungapi tipe A yang disajikan pada atlas ini adalah komplek Gunungapi Salak, Gunungapi Gede – Pangrango, Gunungapi Tangkuban Prah, Gunungapi Ciremai, Gunungapi Guntur, Gunungapi Papandayan dan Gunungapi Galunggung. Atlas ini juga mampu menginspirasi lokasi-lokasi destinasi wisata disekitar kompleks gunungapi tersebut.

Atlas Geospasial Indonesia tahun 2020 ini menyajikan tema Fisik dan Lingkungan Alam skala nasional. Atlas ini merupakan *updating* dari Atlas Nasional Indonesia tema Fisik dan Lingkungan Alam yang telah disusun tahun 2009. Berisi informasi geospasial, foto dan deskripsi yang menyajikan fakta-fakta geografis dan lingkungan alam, seperti iklim, geologi, geomorfologi, rawan bencana dan konservasi. Adalah fakta bahwa Indonesia mempunyai Wilayah NKRI yang membentang antara Sabang hingga Merauke. Jika dibandingkan panjangnya wilayah Indonesia akan melebihi panjang antara Benua Eropa bagian barat Benua Asia, atau antara Kota San Diego yang terletak di pantai barat Benua Amerika, hingga di sebelah timur New York City dan Washington DC dipantai timur Benua Amerika. Indonesia juga memiliki predikat negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang kita miliki diperkirakan lebih dari 17.500 pulau. Hingga tahun 2020 sudah dibuktikan sejumlah 16.771 pulau, dan angka tersebut akan terus bertambah. Wilayah Indonesia berada di atas pertemuan lempeng-lempeng bumi, dimana lempeng-lempeng tersebut terus bergerak sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gempa bumi, rawan letusan gunungapi, dan tsunami. Namun, aktivitas vulkanik dan tektonik tersebut juga menyediakan sumber-sumber kemakmuran bagi Indonesia, yaitu tambang logam dan non logam, minyak bumi dan gas, energi panas bumi, serta tanah pertanian yang subur. Wilayah Indonesia juga dikenal dengan megabiodiversitas karena merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Fakta-fakta tersebut perlu disampaikan secara komprehensif dalam bahasa populer yang mudah dipahami, oleh karena itu BIG menyusun informasi geospasial dalam bentuk atlas yang dapat dimanfaatkan bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Untuk selanjutnya AGI akan terus disusun dengan mengangkat tema yang berbeda setiap tahunnya.

Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG). Atlas ini memberikan informasi indikator TPB yang disajikan dalam bentuk peta, infografis dan narasi terkait capaian 17 tujuan TPB. Penyusunan atlas TPB tahun 2020 menyajikan capaian indikator setiap provinsi di Indonesia dan capaian indikator setiap kabupaten/kota di seluruh Wilayah Kalimantan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian/lembaga terkait tahun 2019 (namun ada beberapa indikator yang masih menggunakan data tahun 2018). Jumlah indikator yang tercantum dalam atlas ini terdiri dari 98 indikator tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan 17 indikator tingkat kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, disesuaikan dengan ketersediaan datanya. Kami menyadari bahwa Atlas Indikator TPB yang telah disusun ini, baru sebatas menampilkan data statistik capaian TPB dalam peta. Namun peta ini sudah memperhatikan gradasi warna dimana wilayah dengan capaian paling rendah (baca: jauh dari target) diberikan warna paling gelap dibanding capaian yang mendekati target. Hal ini, merupakan upaya mempermudah para pembuat kebijakan dalam melihat wilayah-wilayah mana yang memerlukan intervensi kebijakan. Atlas ini juga belum menyajikan *gap* atau kesenjangan antara capaian setiap indikator saat ini dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMN atau target jangka panjang 2030. Dengan informasi *gap*/ kesenjangan setiap indikator, pemerintah dapat lebih tepat dalam memastikan sejauh mana intervensi yang harus diberikan dan di wilayah mana yang harus menjadi fokus penanganan atau perhatian. BIG berharap penyusunan Atlas Indikator TPB selanjutnya dapat memenuhi keinginan tersebut. Sudah barang tentu untuk melakukan analisis lebih lanjut, BIG tidak bisa berjalan sendirian, namun diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik antar K/L, terutama dengan Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs dan BPS serta K/L produsen data SDGs. Diperlukan analisa lebih lanjut untuk mendapatkan *trend projection* atau *trend forecasting*, selain itu juga perlu menyusun *Score Card* sebagai dasar penilaian perbandingan hasil proyeksi *baseline* dengan target SDGs 2030. Semoga dengan tersedianya data TPB yang makin lengkap dan ditunjang dengan peningkatan kerjasama yang terjalin antara BIG dengan K/L terkait, dapat menghasilkan Atlas Indikator TPB Indonesia yang informasinya dapat membantu para pembuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan pada akhirnya kebijakan yang diambil tersebut tepat sasaran sehingga menghasilkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umum sesuai cita-cita dalam pembentukan SDGs.

## Pokja Integrasi Informasi Geospasial Tematik Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Koordinator Pokja: Diah Retno Minarni

### "Dinamika Sumberdaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"



Tahun 2020, Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (Bidang PDS) telah melaksanakan kegiatan IG Strategis Dinamika Sumberdaya yang terdiri dari kegiatan swakelola dan kontraktual. Dalam pelaksanaan IG Strategis Dinamika Sumberdaya, *Output* dari kegiatan kontraktual berupa 4 Peta Neraca Sumberdaya Alam untuk mendukung KLHS RPJMD (yang sebelumnya terdapat 6 Peta sumberdaya alam pemotongan anggaran) dan *Output* dari kegiatan swakelola berupa 5 Peta Neraca Sumberdaya Alam. Kegiatan kontraktual dilaksanakan di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi (Paket 2) serta di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Pariaman (Paket 3). Sementara untuk kegiatan swakelola dilakukan di 5 lokasi yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam pelaksanaan IG Strategis Dinamika Sumberdaya, kendala yang dihadapi adalah terkait pelaksanaan survei perubahan Penutup Lahan di Sulawesi Utara yang harus menerapkan asumsi pada Perubahan Penggunaan Lahan dengan bantuan *Google Street View*. Selain itu, kondisi pandemi yang melanda di awal tahun 2020 juga mengubah pola kegiatan yang ada terutama terkait kegiatan survei lapangan. Namun, semua itu dapat segera ditemukan solusi dengan beberapa penyesuaian. Hingga akhir tahun 2020, Pelaksanaan kegiatan IG Strategis Dinamika Sumberdaya telah terlaksana sebanyak 100%.

Selain tugas pokok, Bidang PDS juga melakukan kegiatan *Prototype* Pemetaan Indikator SDGs level Desa. Kegiatan ini merupakan tugas tambahan dari Bappenas untuk melakukan *monitoring* kemajuan SDGs sampai pada tingkat Desa. Hasil kegiatan ini telah di sosialisasikan dalam Webinar UNGGIM-AP tanggal 7 Oktober 2020. Deputi IGT sebagai ketua dari WG 3 Integrasi Spasial Statistik wilayah Asia Pasifik. Untuk mendukung kegiatan Integrasi Spasial Statistik ini, Bidang PDS juga sudah melakukan Kerjasama dengan BKKBN untuk memonitor indikator SDGs terkait Tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Tahun 2021, Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan Integrasi Spasial Statistik dan Neraca Spasial Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup. Kedua tugas pokok ini akan melibatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai penyedia data-data sekunder yang dibutuhkan. Diperlukan adanya dukungan dari K/L/P agar hasil yang diperoleh dari kegiatan ini juga dapat lebih detail dan memberikan manfaat lebih kepada K/L/P.

Kegiatan Integrasi Spasial Statistik tahun 2021 ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap Perpres TPB No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan TPB. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam satuan wilayah terkecil yaitu desa agar terapan SDGs "*No One Left Behind*" dapat terpenuhi. Kegiatan Integrasi Spasial Statistik ini dilakukan dengan mengintegrasikan data spasial dengan data statistik yang tersedia untuk menyusun Peta Geostatistik yang akan menjawab 17 tujuan dan 169 target SDGs. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Integrasi Spasial Statistik ini dilakukan dengan metode kombinasi Swakelola dan Kontraktual. Swakelola untuk kegiatan Studi Pustaka, FGD, Penyusunan Konsep, Pengumpulan Data, Pembuatan Peta dan Kontraktual untuk kegiatan Pembangunan *Database*. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya Sistem Informasi Geostatistik yang menyajikan Peta Integrasi Spasial – Statistik level Desa yang menjawab 7 Tujuan dan 169 Target SDGs.

Kegiatan Neraca Spasial Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup dilakukan untuk pemberdayaan aset dalam mendorong perekonomian nasional, dimana informasi ini penting bagi para pembuat kebijakan terkait pengelolaan aset sumberdaya alam. Neraca Spasial Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk menghitung nilai aset (dalam mata uang) terkait potensi dan perubahan sumberdaya alam. Di tahun 2021, penyusunan Neraca SDA-LH ini akan mengacu pada UN-SEEA, sehingga BIG perlu melakukan Sinkronisasi antara Klasifikasi Neraca SDA-LH yang sudah ada, sehingga akan menghasilkan Peta Neraca SDA-LH yang sesuai standar. Kegiatan Neraca SDA-LH ini akan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan Peta Penutup Lahan dengan klasifikasi SEEA. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan menghasilkan Atlas Neraca Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup yang sesuai dengan *frame work* SEEA untuk masukan valuasi ekonomi bagi K/L/P lain.



### Redaksi

| Penanggung Jawab: Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Editor: Prita Brada Bumi, Sri Eka Wati, Chintia Dewi, Izuddin Abdul Aziz | Desain Tata Letak: Gin Gin Gustiar |

### Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
Gedung F Lantai 2  
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613  
Fax - PPTRA : (021) 8764613  
Email : redaksi.pttra@gmail.com  
Twitter : @pptra\_big  
Instagram : @pptra\_big  
http://big.go.id/newsletter/